



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

TAHUN 2025-2029



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah unit pelaksana teknis yang menjadi bagian dari penjabaran Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BBPP Kupang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPPSDMP.

Renstra BBPP Kupang Tahun 2025–2029 memuat arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pelatihan vokasi peternakan dan pengembangan SDM pertanian yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, kualitas layanan pelatihan, penguatan tata kelola kelembagaan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Penyusunannya mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan RPJMN Tahun 2025–2029 serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis dan karakteristik wilayah kerja BBPP Kupang.

Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja BBPP Kupang secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kupang, Januari 2026

Kepala BBPP Kupang



Gunawan, S.P., M.Si

NIP. 197407081998031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	7
1.2 Potensi dan Permasalahan	8
1.2.1 Kekuatan (<i>Streangth</i>)	8
1.2.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	11
1.2.3 Peluang (<i>Opportunity</i>)	11
1.2.4 Tantangan (<i>Threat</i>)	13
1.3 Capaian Kinerja BBPP Kupang 2020-2024	15
1.3.1 Pelatihan Vokasi	15
1.3.2 Sertifikasi Kompetensi.....	16
1.3.3 Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).....	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	19
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian 2025-2029	19
2.1.1 Visi Kementerian Pertanian 2025-2029.....	19
2.1.2 Misi Kementerian Pertanian 2025-2029	20
2.1.3 Tujuan kementerian Pertanian 2025-2029	20
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025-2029	21
2.2.1 Visi BPPSDMP 2025-2029.....	21
2.2.2 Misi BPPSDMP 2025-2029	22
2.2.3 Tujuan PPSDMP 2025-2029.....	23
2.3 Sasaran Program BPPSDMP	23
2.4 Sasaran Program Pusat Pelatihan Pertanian	24
2.5 Sasaran, Indikator, dan Tujuan Operasional BBPP Kupang.....	26
2.5.1 Sasaran Kegiatan.....	26
2.5.2 Indikator Kinerja Utama.....	27
2.5.3 Tujuan Operasional.....	27
2.6 Pohon Kinerja	28

2.7 Manajemen Risiko	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	34
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025-2029	37
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pelatihan Pertanian 2025-2029.....	39
3.4 Strategi Operasional BBPP Kupang 2025-2029.....	40
3.4.1 Arah Kebijakan BBPP Kupang 2025-2029.....	40
3.4.2 Strategi BBPP Kupang 2025-2029	42
3.5 Kerangka Regulasi	44
3.6 Kerangka Kelembagaan	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	47
4.1 Target Kinerja	47
4.2 Kerangka Pendanaan	48
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tujuan BPPSDMP 2025-2029	23
2. Sasaran Umum Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian.....	24
3. Manajemen Risiko BBPP Kupang 2025-2029	31
4. Target Kinerja BBPP Kupang 2025-2029	47
5. Kerangka Pendanaan BBPP Kupang 2025-2029	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tren Jumlah Peserta Pelatihan BBPP Kupang Tahun 2020-2025	16
2. Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi BBPP Kupang Tahun 2020-2025 ..	17
3. <i>Summary</i> Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025-2029	28
4. <i>Blueprint</i> Swasembada pangan 2025-2029.....	35
5. Rumah Strategi Kementerian Pertanian	36

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sektor pertanian, khususnya peternakan, merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional dan penggerak ekonomi yang vital. Di tengah tantangan perubahan iklim dan krisis pangan global, transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama guna mencapai kemandirian pangan sesuai Agenda Pembangunan Nasional 2025–2029 (Astacita). Dalam kerangka organisasi Kementerian Pertanian, mandat sentral untuk menyiapkan SDM yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha diamanatkan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Renstra BPPSDMP Periode 2025–2029 secara tegas berfokus pada dua pilar utama, yakni penguatan ketahanan pangan dan percepatan regenerasi petani. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan vokasi, menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung secara penuh pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis tingkat pusat. Dukungan ini diimplementasikan melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan sertifikasi yang responsif terhadap kebutuhan wilayah, serta berorientasi pada penciptaan pelaku usaha tani yang berkelanjutan.

Secara kelembagaan, peran strategis BBPP Kupang telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP terkait peningkatan status Eselon IIB dan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 181/Kpts /OT.020 // II /2023 tentang pembagian wilayah kerja unit pelaksana teknis pelatihan di lingkup BPPSDMP, yang menetapkan wilayah kerja mencakup 10 provinsi di wilayah Indonesia Timur , mulai dari Nusa Tenggara hingga Maluku. Fokus utama pada pengembangan ternak potong dan teknologi lahan kering didukung oleh keunggulan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) dan anti-penyuapan (ISO 37001:2016). Selain itu, eksistensi *Teaching Factory* (TEFA) seperti Singgako Mart dan kandang ayam tipe *closed house* berkapasitas 5.000 ekor menjadi instrumen modernisasi pembelajaran berbasis praktik di lapangan.

Kinerja BBPP Kupang pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam aspek output pelatihan, tercatat sebanyak 7.379 orang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan sebagai purnawidya. Tren partisipasi tahunan mengalami peningkatan dari 1.054 orang (2020) menjadi 1.538 orang (2024). Inklusivitas juga terjaga dengan partisipasi perempuan mencapai 1.795 orang. Pada sisi pengakuan profesionalisme, sebanyak 313 peserta telah tersertifikasi kompetensi melalui skema TUK yang dikelola BBPP Kupang. Capaian ini berkontribusi pada penguatan ketersediaan tenaga kerja sektor peternakan di wilayah kerja BBPP Kupang.

Penguatan peran BBPP kupang sebagai simpul pelatihan vokasi di kawasan Indonesia Timur juga tercermin pada ekspansi pembinaan kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Hingga tahun 2024, seiring dengan perluasan wilayah binaan yang kini mencakup Provinsi NTT dan NTB, tercatat total 144 unit P4S yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131 unit berstatus aktif, sementara 13 unit dikategorikan tidak aktif. Kondisi ini menunjukkan potensi besar basis pelatihan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi BBPP Kupang untuk melakukan fungsi pendampingan dan revitalisasi kelembagaan pada periode Renstra berikutnya.

Namun demikian, guna mempertahankan momentum pertumbuhan ini dalam periode 2025–2029, BBPP Kupang masih dihadapkan pada tantangan internal yang bersifat struktural. Isu krisis regenerasi pegawai akibat banyaknya tenaga yang memasuki purna bakti berpotensi menimbulkan kendala dalam manajemen operasional jika tidak segera dimitigasi. Selain itu, kondisi sebagian sarana prasarana yang telah berusia tua serta perlunya akselerasi adopsi teknologi digital dalam metode pelatihan menjadi poin krusial yang harus dibenahi.

Rencana Strategis BBPP Kupang 2025–2029 ini disusun untuk mengkonversi seluruh kekuatan dan capaian positif masa lalu menjadi lompatan strategis, sekaligus mengintervensi kelemahan internal agar BBPP Kupang tetap relevan sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) peternakan di Indonesia Timur.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa BBPP Kupang adalah Unit Pelaksana

Teknis (UPT) di bidang pelatihan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan.

Sebagai UPT pelatihan di bidang peternakan, BBPP Kupang memiliki beragam potensi sekaligus tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian. Kondisi tersebut mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BBPP Kupang, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk memahami kondisi tersebut secara komprehensif, dilakukan analisis lingkungan strategis organisasi yang meliputi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan). Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan strategi dan arah kebijakan BBPP Kupang dalam periode Rencana Strategis 2025–2029.

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal, terdapat sejumlah faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) bagi BBPP Kupang. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Peraturan tersebut menetapkan peningkatan status kelembagaan BBPP Kupang dari Eselon III A menjadi Eselon II B, yang memperluas mandat dan kewenangannya dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian. Selain itu, terjadi pula perluasan jenis pelatihan yang diselenggarakan, dari semula berfokus pada agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering, menjadi lebih beragam mencakup pelatihan teknis, kewirausahaan, serta pelatihan fungsional bagi aparatur dan non-aparatur pertanian.
- b. Berdasarkan perubahan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Nomor 181/Kpts/OT.020/II/2023 tanggal 20 November 2023 tentang pembagian wilayah kerja UPT Pelatihan sesuai tugas dan fungsi, BBPP Kupang dimandatkan memiliki wilayah kerja nasional yang mencakup 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan

Maluku Utara, dengan fokus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang peternakan, khususnya ternak potong dan teknologi lahan kering.

- c. Memiliki 8 (delapan) jenis pelatihan terakreditasi yakni pelatihan sapi potong, Pelatihan pengolahan hasil ternak, Pelatihan Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak, Pelatihan Agribisnis ayam, Pelatihan Pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dan Pupuk Organik, Pelatihan Agribisnis Ternak Kambing, Pelatihan perawatan induk dan pedet, Pelatihan Manajemen Hijauan Pakan Ternak.
- d. Merupakan salah satu Tempat Uji Kompetensi (TUK) sektor pertanian yang melayani berbagai skema kompetensi. Kompetensi yang dilayani meliputi bidang penyuluhan pertanian (advisor penyuluh pertanian, fasilitator penyuluh pertanian, dan supervisor penyuluh pertanian), bidang reproduksi ternak ruminansia besar (inseminator dan pemeriksa kebuntingan), bidang juru sembelih halal, bidang pertanian organik (fasilitator organik), serta bidang butcher (butcher junior, senior, dan master).
- e. memiliki sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu dan Sertifikat ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelatihan yang lengkap dan representatif. Sarana dan prasarana tersebut mencakup asrama, ruang makan, ruang kelas, Rumah Potong Hewan (RPH), aula, laboratorium pengolahan hasil, klinik hewan, lahan praktik, lahan hijauan pakan ternak, perkandangan, *Agriculture Operation Room* (AOR), *greenhouse*, *sport center*, outlet, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya.
- g. Tersedianya Tenaga Ahli Pelatihan yaitu Widyaswara sebanyak 14 Orang dan Calon Widyaswara 4 Orang.
- h. Tersedianya sarana dan prasarana *Teaching Factory* (TEFA) yang mendukung pembelajaran berbasis praktik, produksi, dan kewirausahaan. Sarana TEFA tersebut meliputi Singgako Mart sebagai unit hilirisasi dan pemasaran, kandang ayam tipe *closed house* berkapasitas ± 5.000 ekor, serta infrastruktur pendukung berupa embung dan sumur bor yang menjamin keberlanjutan operasional. Singgako Mart diarahkan sebagai wahana pemasaran hasil peternakan dan pertanian BBPP Kupang sekaligus media pembelajaran kewirausahaan bagi peserta pelatihan, serta dikembangkan melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait.

Sementara itu, keberadaan kandang ayam tipe *closed house* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran teknologi budidaya unggas modern, tetapi juga diharapkan mampu menjadi sumber penyedia daging ayam untuk wilayah di sekitar BBPP Kupang. Dukungan embung dan sumur bor memperkuat ketahanan air dalam mendukung kegiatan produksi, pelatihan, dan praktik lapangan, sehingga secara keseluruhan TEFA BBPP Kupang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan relevansi pelatihan, kemandirian unit, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan wilayah.

1.2.2 Kelemahan (*weakness*)

Selain kekuatan yang dimiliki masih dihadapi beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Ketersediaan SDM yang belum proporsional dengan beban kerja menyebabkan terjadinya rangkap tugas pada pegawai, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. Kegiatan pelatihan yang belum bisa menjangkau seluruh wilayah kerja yang ditetapkan;
- c. Sebagian tenaga fungsional widyaiswara belum disertifikasi dengan keahlian khusus;
- d. Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai masih kurang untuk kriteria Balai Besar;
- e. Sebagian sarana dan prasarana pelatihan yang sudah berusia tua;
- f. Sistem pelatihan yang berorientasi pada kompetensi kerja belum terlaksana sepenuhnya;
- g. Perencanaan pelatihan keahlian, perumusan kebutuhan, kemitraan dan pendayagunaan kelembagaan pelatihan belum dilaksanakan secara optimal;
- h. Adopsi teknologi yang masih rendah baik dalam penyelenggaraan pelatihan maupun dalam pelaksanaan praktek dilapangan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

- a. Dukungan kebijakan nasional yang semakin kuat

Dalam periode 2025–2029, pemerintah menempatkan ketahanan pangan, hilirisasi pertanian, dan pembangunan berbasis desa sebagai prioritas

utama pembangunan nasional. Arah kebijakan tersebut memberikan peluang besar bagi BBPP Kupang untuk memperkuat perannya dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian, khususnya di wilayah Indonesia Timur . Harmonisasi sasaran Renstra BPPSDMP dengan RPJMN 2025–2029, Perpres tentang Swasembada Pangan, serta Inpres Nomor 3 Tahun 2025, tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan membuka akses yang lebih luas terhadap dukungan kebijakan, pendanaan APBN, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kondisi ini menjadi momentum strategis bagi BBPP Kupang untuk memperluas jangkauan program pelatihan, meningkatkan inovasi pembelajaran, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

b. Perkembangan teknologi digital

Perkembangan teknologi digital dan transformasi sistem pertanian modern juga menjadi peluang strategis bagi BBPP Kupang dalam meningkatkan efektivitas pelatihan dan daya saing SDM pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem manajemen pembelajaran berbasis digital, serta platform pelatihan daring membuka ruang bagi BBPP Kupang untuk menjangkau peserta pelatihan secara lebih luas, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Melalui berbagai program pelatihan teknis, kewirausahaan, dan sertifikasi kompetensi, BBPP Kupang memiliki peluang untuk mencetak SDM peternakan milenial yang inovatif, profesional, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi penggerak utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur

c. Peluang kerja sama pelatihan

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang memiliki jejaring kerja sama yang kuat dan luas dengan berbagai pemangku kepentingan strategis, meliputi pemerintah daerah, dinas yang membidangi pertanian dan peternakan, balai pelatihan, koperasi, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur (BBRMP), perguruan tinggi negeri dan swasta termasuk Universitas Nusa Cendana dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Politani Kupang, Politeknik Kupang, dan SMK se-Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Selain itu, BBPP Kupang juga menjalin kerja sama dengan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Kerja sama tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan tenaga pelatih dan fasilitator yang kompeten di bidang peternakan dan teknologi lahan kering, penyelenggaraan pelatihan, magang dan praktik kerja, penjaminan mutu, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan. Jejaring kemitraan ini menjadi kekuatan strategis BBPP Kupang dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat pencapaian sasaran strategis Renstra.

d. Akselerasi Digitalisasi dan *Smart Farming* 4.0

Perluasan infrastruktur internet di wilayah perdesaan, meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap perangkat teknologi pertanian dan peternakan berbasis digital seperti sensor *Internet of Things* (IoT), alat pemantauan ternak, serta *drone* untuk pemetaan dan pengawasan, serta berkembangnya berbagai aplikasi *smart farming*, memberikan peluang strategis bagi BBPP Kupang untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kebijakan nasional terkait transformasi digital sektor pertanian dan pengembangan *Smart Farming* 4.0 semakin memperkuat peran BBPP Kupang sebagai pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia peternakan di kawasan Indonesia Timur .

Sejalan dengan hal tersebut, BBPP Kupang berpeluang mengembangkan pembelajaran berbasis *e-learning* dan pelatihan jarak jauh, serta memperluas penerapan lahan percontohan (*demplot*) dan praktik teknologi peternakan presisi sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik dan data. Pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan, mendukung pemantauan dan evaluasi berbasis data secara real time, serta memperluas jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan di kawasan Indonesia Timur .

1.2.4 Tantangan (*Threat*)

- a. Dinamika Era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang Mengganggu Stabilitas Program.

Era VUCA yang ditandai dengan kondisi volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu menjadi tantangan besar bagi BBPP Kupang dalam merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan pertanian. Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat menuntut balai untuk memiliki visi yang jelas, pemahaman mendalam terhadap isu-isu terkini, kejelasan arah kebijakan, serta kelincahan dalam menyesuaikan metode pelatihan. Tanpa kemampuan adaptasi tersebut, pelaksanaan program pelatihan berisiko tidak relevan lagi dengan kebutuhan di lapangan.

- b. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Risiko Geopolitik

Fluktuasi ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional berdampak langsung pada stabilitas sektor pertanian nasional. Perubahan mendadak harga komoditas, kebijakan perdagangan internasional, atau hambatan logistik dapat memengaruhi daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani. Bagi BBPP Kupang, kondisi ini dapat menurunkan efektivitas pelatihan, terutama jika materi yang disusun tidak sejalan dengan kondisi pasar. Selain itu, ketergantungan pada input impor seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian menambah risiko hambatan pelaksanaan pelatihan apabila terjadi kenaikan harga atau gangguan pasokan.

- c. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi

Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi keberhasilan program pelatihan BBPP Kupang. Pergeseran pola curah hujan, meningkatnya suhu, serta frekuensi kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang dapat mengganggu kalender tanam maupun kegiatan praktik lapangan. Selain menurunkan produktivitas lahan pecontohan (*demfarm*), kondisi ini juga berpotensi merusak sarana prasarana pelatihan yang dimiliki balai. Tanpa strategi adaptasi iklim yang memadai, capaian output pelatihan dapat menurun secara signifikan.

d. Menurunnya Jumlah dan Regenerasi Petani

Penurunan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian serta banyaknya alih fungsi lahan berdampak pada berkurangnya jumlah petani produktif. Mayoritas petani di wilayah layanan BBPP Kupang berada pada rata-rata usia 47 tahun, yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengadopsi teknologi baru. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi BBPP Kupang dalam mendorong modernisasi pertanian, karena materi pelatihan yang berorientasi pada teknologi tidak selalu dapat diterapkan secara optimal oleh peserta dengan keterbatasan adaptasi.

e. Ketimpangan Akses Digital dan Keterbatasan Infrastruktur Penyuluhan

Wilayah binaan BBPP Kupang, khususnya daerah 3T, masih mengalami keterbatasan internet, pasokan listrik, dan sarana penyuluhan yang memadai. Ketimpangan infrastruktur ini menghambat implementasi pembelajaran digital, penggunaan aplikasi pertanian, dan metode penyuluhan daring yang saat ini menjadi arah transformasi nasional. Bagi BBPP Kupang, kondisi tersebut membuat sebagian kelompok tani tidak dapat mengakses inovasi teknologi secara optimal sehingga berpotensi tertinggal dari daerah lain dalam pemanfaatan teknologi pertanian modern.

f. Keterbatasan Anggaran dan Ketergantungan pada APBN

Keterbatasan ruang fiskal nasional berpengaruh besar pada ketersediaan anggaran untuk program pelatihan dan pengembangan SDM pertanian. Ketergantungan BBPP Kupang pada dana APBN menjadikan kegiatan pelatihan rentan terganggu apabila terjadi revisi atau pemotongan anggaran akibat perubahan kebijakan nasional. Kondisi ini membatasi kemampuan balai untuk berinovasi atau memperluas program, terutama yang terkait digitalisasi dan penguatan sarana prasarana. Tanpa upaya diversifikasi pendanaan melalui kemitraan atau skema alternatif, fleksibilitas BBPP Kupang dalam merespon perubahan eksternal tetap terbatas.

1.3 Capaian Rencana Strategis BBPP Kupang 2020-2024

1.3.1 Pelatihan Vokasi

Penyelenggaraan pelatihan vokasi pertanian di BBPP Kupang merupakan instrumen strategis untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap transformasi teknologi pertanian modern. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan pelatihan memiliki kapasitas, sikap profesional, dan pemahaman yang memadai guna berkontribusi secara efektif dalam pembangunan sektor pertanian. Selama periode Tahun 2020–2024, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BBPP Kupang tercatat sebanyak 7.379 orang, terdiri atas 5.584 peserta laki-laki dan 1.795 peserta perempuan, yang menunjukkan partisipasi SDM pertanian secara inklusif.



Gambar 1. Tren Jumlah Peserta Pelatihan BBPP Kupang Tahun 2020-2025

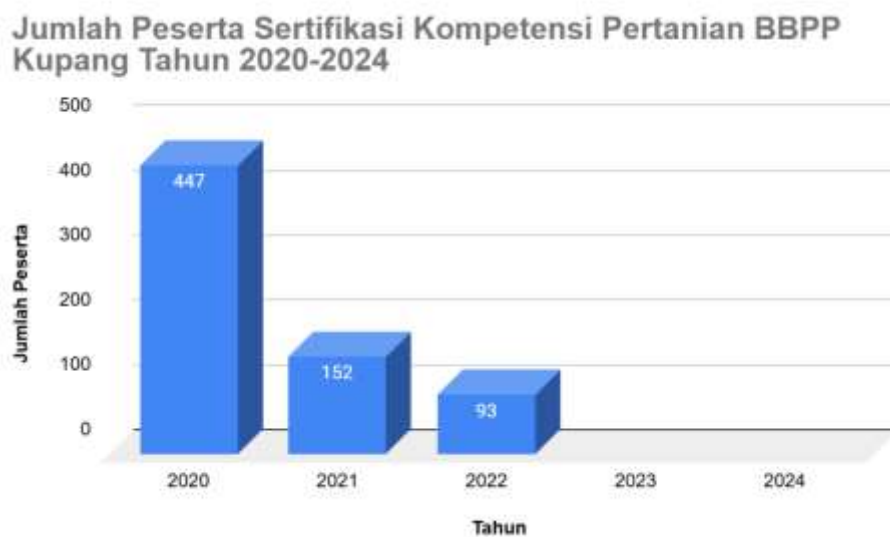
Dilihat dari tren tiga tahun terakhir, jumlah peserta pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2022, peserta pelatihan tercatat sebanyak 450 orang, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 1.390 orang pada Tahun 2024. Tren peningkatan ini mencerminkan meningkatnya volume dan intensitas penyelenggaraan pelatihan vokasi pertanian oleh BBPP Kupang, sekaligus menunjukkan penguatan peran balai sebagai unit pelaksana teknis strategis dalam mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, khususnya di wilayah kerja BBPP Kupang.

1.3.2 Sertifikasi Kompetensi

Selama periode Renstra BBPP Kupang Tahun 2020–2024, kinerja di bidang sertifikasi menunjukkan capaian yang signifikan dalam mendukung penjaminan mutu SDM pertanian. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan 23 kegiatan sertifikasi kompetensi yang berhasil merealisasikan sertifikasi bagi 692 peserta. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi, serta tingginya kebutuhan dan minat terhadap layanan sertifikasi kompetensi di sektor pertanian.

Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi peran BBPP Kupang sebagai Tempat Uji Kompetensi, penguatan koordinasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian Bidang Sertifikasi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi dan daya saing SDM pertanian, sejalan dengan sasaran strategis BBPP Kupang dalam pengembangan SDM pertanian yang profesional dan tersertifikasi.

Secara kuantitatif, perkembangan jumlah peserta sertifikasi kompetensi BBPP Kupang selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi BBPP Kupang Tahun 2020-2025

1.3.3 Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)

Kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam menjalankan fungsi pelatihan berbasis masyarakat sebagai bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia pertanian. Pada Tahun 2022, jumlah P4S yang aktif tercatat sebanyak 56 unit, kemudian meningkat menjadi 75 unit pada Tahun 2023.

Pada tahun 2024, wilayah binaan BBPP Kupang dalam pengembangan kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) mengalami perluasan, dari yang semula hanya mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Perluasan wilayah binaan ini merupakan bagian dari penguatan peran BBPP Kupang sebagai simpul pelatihan vokasi pertanian di kawasan Indonesia Timur.

Seiring dengan penambahan wilayah binaan tersebut, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 144 P4S berada dalam wilayah pembinaan BBPP Kupang, yang terdiri atas 78 P4S di Provinsi NTT dan 66 P4S di Provinsi NTB. P4S tersebut bergerak pada berbagai subsektor, meliputi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, serta kewirausahaan pertanian berbasis potensi lokal.

Kondisi ini menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan berbasis masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan pembinaan dan fasilitasi BBPP Kupang. Keberadaan P4S di dua provinsi tersebut berperan strategis sebagai wahana pembelajaran terapan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas dan regenerasi pelaku utama pertanian di tingkat desa. Selain itu, P4S menjadi instrumen penting dalam menjembatani implementasi program-program pembangunan pertanian nasional dengan kebutuhan riil masyarakat tani di wilayah binaan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Pertanian, seluruh arah kebijakan dan strategi BBPP Kupang mengacu secara penuh pada koridor pembangunan pertanian nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya sinergitas dan keselarasan langkah dalam mencapai target makro pemerintah pusat selama periode 2025–2029.

2.1.1 Visi Kementerian Pertanian 2025-2029

Kementerian Pertanian merumuskan visi yang menjadi representasi kontribusi sektor pertanian terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Visi Kementerian Pertanian 2025–2029 adalah:

“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut menitikberatkan pada empat kata kunci strategis sebagai berikut :

- a. Pertanian: Sesuai UU No. 22 Tahun 2019, dimaknai sebagai kegiatan pengelolaan sumber daya alam hayati berbasis teknologi, modal, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- b. Pertanian Maju: Menekankan pada adopsi teknologi terkini dan praktik pertanian modern di seluruh rantai nilai (*value chain*), mulai dari penyiapan sarana prasarana hingga pemasaran.
- c. Pertanian berkelanjutan: Prinsip pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung kebijakan ekonomi sirkular untuk kepentingan generasi mendatang.
- d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia: Pembangunan yang memberikan dampak nyata berupa ketersediaan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, penyediaan bahan baku energi baru terbarukan (EBT), dan perwujudan kesehatan masyarakat (*One Health*).

2.1.2 Misi Kementerian Pertanian 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan lima misi utama Kementerian Pertanian 2025–2029, yakni:

- a. Meningkatkan kesejahteraan petani : Mewujudkan kondisi hidup layak melalui perlindungan usaha, kemandirian, dan kepastian harga pada seluruh rantai nilai pertanian.
- b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian : Memperkuat kemampuan produksi dalam negeri melalui swasembada pada komoditas strategis yang menjadi prioritas nasional.
- c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia : Optimalisasi produk pertanian sebagai pemenuh pangan, peningkatan pendapatan petani, serta sumber bahan baku EBT.
- d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia : Implementasi sistem kesehatan hewan nasional yang komprehensif untuk meminimalisir dampak Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- e. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat : Mewujudkan birokrasi yang efektif (General dan Tematik) sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

2.1.3 Tujuan Kementerian Pertanian 2025-2029

Berdasarkan kelima misi tersebut, dirumuskan Tujuan Kementerian Pertanian 2025–2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian yang diukur melalui indikator pertumbuhan volume usaha dan pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.
- b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, yang diukur melalui indeks swasembada pangan prioritas, indeks penerapan sistem budidaya, dan indeks cadangan pangan nasional..
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat yang diukur melalui persentase pemenuhan bahan baku *bioenergy*, pertumbuhan ekspor, serta peningkatan hilirisasi produk.
- d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia, yang diukur melalui persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular ke manusia (*zoonosis*).

- e. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, yang diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMMP 2025–2029

Sebagai unit eselon I yang membawahi BBPP Kupang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada transformasi manusia sebagai penggerak utama sektor pertanian.

2.2.1 Visi BPPSDMP 2025–2029

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) 2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah:

“Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.”

Rumusan visi ini menandai perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian menjadi *Human Capital*. Manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai faktor produksi, melainkan modal intelektual dan strategis yang memiliki empat karakteristik utama :

- a. SDM Pertanian Produktif : Mampu meningkatkan produksi secara berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ekonomi.
- b. SDM Pertanian Maju : Cakap dalam mengadopsi kemajuan teknologi pada seluruh rantai nilai pertanian.
- c. SDM Pertanian Mandiri : Memiliki determinasi tinggi dan tidak bergantung pada intervensi eksternal dalam mengelola usaha.
- d. SDM Pertanian Sejahtera : Mampu mencapai kualitas hidup layak melalui akses yang adil terhadap sumber daya dasar.

Untuk mengawal pencapaian visi tersebut, BPPSDMP menginternalisasi sistem nilai organisasi yang meliputi :

- a. Inklusif, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- b. Profesional, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- c. Modern, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

2.2.2 MISI BADAN PPSDMP 2025 – 2029

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan.

- a. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang: Mengubah persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian melalui penguasaan teknologi pertanian maju guna menjamin keberlanjutan sektor pertanian nasional.
- b. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian: Menempatkan investasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM pertanian agar mampu menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan inovatif.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional: Meningkatkan kualitas birokrasi di seluruh unit kerja sebagai aspek fundamental dalam mendukung kinerja organisasi secara holistik.

2.2.3 TUJUAN BADAN PPSDMP 2025 – 2029

Tujuan BPPSDMP merupakan penjabaran operasional yang terukur dari misi organisasi, yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan BPPSDMP 2025 – 2029

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (2025 – 2029)
Meningkatnya petanimuda/milenial di desa	Persentase desa dengan peningkatan jumlah petani muda	22,03% → 22,43%
Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	1% Per Tahun
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang akuntabel	Tindak lanjut temuan auditor	88,5% → 89,5%
	Nilai IKPA BPPSDMP	90,00 → 91,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,60 → 3,64

2.3 Sasaran Program BPPSDMP 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, Sasaran Program dirumuskan sebagai hasil yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian melalui penerjemahan Pohon Kinerja 2025–2029. BPPSDMP menetapkan Sasaran Program berupa “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani” sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pertumbuhan usaha tani nasional.

Peningkatan kelas ini dimaknai sebagai transformasi kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan penguatan kapasitas, kinerja, dan tata kelola hasil intervensi program BPPSDMP. Hal ini mencerminkan unit usaha tani yang memiliki produktivitas lebih tinggi, manajemen keuangan yang akuntabel, serta posisi tawar yang lebih kompetitif dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks ini, SDM pertanian bertindak sebagai aset utama (*human capital*) yang menentukan keberhasilan inovasi bisnis, sehingga kualitas SDM yang unggul dan berjiwa wirausaha menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan pelaku usaha tani yang mandiri dan sejahtera.

2.4 Sasaran Program Pusat Pelatihan Pertanian

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan sasaran pembangunan sumber daya manusia pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) menetapkan sasaran umum kebijakan periode 2025–2029, yaitu terwujudnya “SDM Pertanian yang Produktif, Maju, Mandiri, dan Sejahtera” sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

Adapun pokok-pokok Sasaran Umum Kebijakan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Sasaran Umum Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Pokok -Pokok Sasaran Umum	Makna Sasaran Umum
SDM Pertanian Produktif	SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga
SDM Pertanian Maju	SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
SDM Pertanian Mandiri	SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha.
SDM Pertanian Sejahtera	SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya
Pelatihan	Setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung

	jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Sertifikasi Kompetensi	Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, Standard Internasional, dan/ atau Standard Khusus.

Adapun Strategi Utama Pusat Pelatihan Pertanian, yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
2. Mengembangkan penyelenggaraan pelatihan;
3. Mengembangkan dan melaksanakan akreditasi program pelatihan;
4. Mengembangkan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri;
6. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta tata usaha

Pusat Pelatihan Pertanian menetapkan tujuan: Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian.

Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian mendukung Pembangunan Pertanian

Kinerja Badan PPSDMP diterjemahkan menjadi 1 (satu) Sasaran Program (SP): “Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.” Capaian terhadap sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): “Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas.” Berdasarkan sasaran tersebut, maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Lingkup Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2025 – 2029 adalah:

SK 1. Meningkatnya kompetensi petani; IKSK 1.1 SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)

SK 2. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan); IKSK 2.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi

pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur) (%); IKSK 2.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur) (%).

SK 3. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan teknis pertanian (sesudah pelatihan); IKSK 3.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%); IKSK 3.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) (%).

SK 4. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; IKSK 4.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (Skala Likert). Secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra Pusat Pelatihan Pertanian

2.5 Sasaran, Indikator, dan Tujuan Operasional BBPP Kupang

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II di bawah Pusat Pelatihan Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melaksanakan fungsi operasional dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian, khususnya pada subsektor peternakan dan pertanian lahan kering di wilayah kerja.

Sejalan dengan sasaran program BPPSDMP, sasaran, indikator, dan tujuan operasional BBPP Kupang dirumuskan sebagai cascading langsung untuk memastikan keterkaitan sebab-akibat yang jelas antara kebijakan pengembangan SDM pertanian dan capaian kinerja unit kerja.

2.5.1 Sasaran kegiatan

- a. Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan). Sasaran ini mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas SDM pertanian, baik aparatur maupun non-aparatur, sebagai prasyarat penguatan kinerja usaha tani dan peningkatan kesejahteraan petani.
- b. Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan). Sasaran ini mencerminkan komitmen BBPP Kupang dalam menjamin mutu proses pembelajaran, efektivitas layanan pelatihan, serta relevansi materi dan metode pelatihan dengan kebutuhan pengguna.

- c. Sasaran Kegiatan 3 (Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang). Sasaran ini mendukung terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
- d. Sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang). Sasaran ini menegaskan peran BBPP Kupang sebagai penyedia layanan publik di bidang pelatihan pertanian yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

2.5.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja BBPP Kupang bersifat operasional dan pembinaan, digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sasaran program BPPSDMP pada level unit kerja Eselon II, meliputi:

- IKU 1.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%).
- a. IKU 1.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan peserta pelatihan teknis pertanian (non-aparatur) (%).
- b. IKU 2 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan (Skala Likert).
- c. IKU 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang.
- d. IKU 4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang (Skala Likert).

2.5.3 Tujuan Operasional

Tujuan operasional BBPP Kupang sebagai unit kerja Eselon II ditetapkan untuk mempertegas ruang lingkup peran organisasi, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pelatihan vokasi pertanian dan peternakan berbasis kompetensi melalui pendekatan *Teaching Factory* (TEFA) yang aplikatif untuk mendukung percepatan regenerasi petani dan pelaku usaha tani di wilayah kerja.
- b. Meningkatkan relevansi dan mutu pembelajaran melalui standarisasi kurikulum, penguatan kapasitas Widyaiswara, dan pemanfaatan teknologi digital sesuai tantangan pertanian modern.
- c. Menjamin akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya melalui pengelolaan anggaran yang presisi serta pemenuhan standar Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- d. Mengoptimalkan kualitas layanan publik dan kemitraan strategis guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat serta kepercayaan *stakeholder* terhadap peran BBPP Kupang di kawasan Indonesia Timur.

2.6 Pohon Kinerja

Pohon kinerja merupakan instrumen strategis untuk memastikan keterkaitan logis antara sasaran pembangunan nasional, kebijakan Kementerian Pertanian, hingga capaian kinerja unit kerja di lingkup BPPSDMP. Sesuai PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021, pohon kinerja disusun dengan pendekatan sebab–akibat (*causal logic*) yang menggambarkan hubungan berjenjang antara *outcome*, *intermediate outcome*, *immediate outcome*, hingga output sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.



Gambar 3. Summary Pohon Kinerja Kementrian Pertanian 2025 – 2029

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029, ditetapkan lima *final outcome* pembangunan sektor pertanian. Dari kelima *outcome* tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berkontribusi secara langsung terhadap *Final Outcome 1*, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani. Posisi ini menegaskan peran BPPSDMP sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia pertanian yang mendukung pencapaian *outcome* sektor pertanian lainnya secara berkelanjutan.

Sebagaimana tergambar dalam pohon kinerja Kementerian Pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dicapai melalui *Intermediate Outcome* sektor berupa meningkatnya pendapatan petani, yang antara lain diukur melalui Nilai Tukar Usaha Tani (NTUT) dan pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian. Pada level subsektor, *intermediate outcome* tersebut diturunkan menjadi

meningkatnya indeks harga yang diterima petani, sebagai indikator perbaikan posisi ekonomi petani dalam sistem usaha tani dan mekanisme pasar. Lebih lanjut, pada level operasional, peningkatan pendapatan dan harga yang diterima petani dipengaruhi oleh beberapa *Immediate Outcome* utama, yaitu:

- a. Tersedianya perlindungan usaha dan akses pembiayaan,
- b. Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian dan kapasitas petani, serta
- c. Tersedianya akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tani.

Dalam keterkaitan hierarkis tersebut, pencapaian *Final Outcome* peningkatan kesejahteraan petani tidak terlepas dari peran Unit Pelaksana Teknis di bawah BPPSDMP yang berfungsi langsung pada level operasional. Dalam konteks ini, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai UPT pelatihan vokasi pertanian memiliki peran strategis dalam menerjemahkan sasaran pembangunan sumber daya manusia pertanian ke dalam program dan kegiatan yang aplikatif, terukur, dan berorientasi hasil.

Kontribusi BBPP Kupang diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, penguatan pembelajaran terapan berbasis *Teaching Factory*, serta peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan. Melalui pendekatan tersebut, BBPP Kupang berkontribusi secara kausal terhadap pencapaian *immediate outcome* sektor, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, kapasitas pelaku usaha tani, dan efektivitas layanan pendukung, yang pada akhirnya menjadi prasyarat peningkatan produktivitas, daya saing usaha tani, dan pendapatan petani.

Secara operasional, kontribusi utama BBPP Kupang tercermin pada peningkatan kompetensi peserta pelatihan aparatur dan non-aparatur pascapelatihan, yang diukur melalui penurunan indeks kesenjangan kompetensi. Peningkatan kompetensi tersebut dicapai melalui penyelenggaraan pelatihan teknis pertanian yang relevan dengan kebutuhan wilayah lahan kering, penguatan praktik kerja melalui *Teaching Factory*, serta peningkatan penguasaan keterampilan kerja berbasis standar kompetensi. Penguatan kapasitas ini menjadi faktor pendukung penting dalam peningkatan kinerja dan produktivitas pelaku usaha pertanian.

Kualitas penyelenggaraan pelatihan dijaga melalui peningkatan kepuasan peserta pelatihan, yang mencerminkan efektivitas proses pembelajaran, relevansi materi, serta kinerja widyaiswara dan fasilitator. Sejalan dengan itu, BBPP Kupang memperkuat tata kelola organisasi melalui peningkatan kualitas pengelolaan

anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran, sebagai prasyarat keberlanjutan program dan kegiatan pelatihan.

Selain itu, BBPP Kupang juga berkomitmen meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik melalui penyelenggaraan layanan pelatihan yang profesional, transparan, dan responsif. Peningkatan kualitas layanan publik tersebut memperkuat peran BBPP Kupang sebagai pusat unggulan pelatihan vokasi pertanian dan peternakan di wilayah Indonesia Timur, sekaligus mendukung pencapaian sasaran BPPSDMP dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

2.7 Manajemen Risiko

Manajemen risiko BBPP Kupang merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian visi, misi, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja BBPP Kupang Tahun 2025–2029. Penerapan manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam konteks pelaksanaan Renstra 2025 – 2029, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, pengembangan *Teaching Factory* (TEFA), sertifikasi kompetensi, penguatan P4S, serta transformasi digital pelatihan dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, dan karakteristik wilayah lahan kering.

Penerapan manajemen risiko di BBPP Kupang didesain sebagai instrumen strategis untuk menjamin kepastian tercapainya sasaran kegiatan melalui identifikasi dini terhadap potensi deviasi pada indikator kinerja utama. Secara teknokratis, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi untuk meminimalkan dampak volatilitas lingkungan strategis terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan vokasi, keandalan layanan publik, serta akuntabilitas tata kelola anggaran. Integrasi manajemen risiko ke dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program diarahkan untuk memperkuat basis pengambilan keputusan manajerial yang data-driven dan berbasis risiko (*risk-based decision making*). Hal ini menjadi prasyarat krusial dalam menjamin keberlanjutan program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan

efektivitas intervensi kebijakan di seluruh wilayah kerja BBPP Kupang secara konsisten dan terukur.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, sasaran kegiatan, dan arah kebijakan BBPP Kupang Tahun 2025 – 2029, risiko pembangunan SDM pertanian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

Tabel 3. Manajemen Risiko BBPP Kupang 2025 – 2029

No	IKSK	Risiko Utama	Dampak	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	SK1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan	Kesenjangan kompetensi peserta pascapelatihan masih tinggi	IKU.1 dan IKU.2 tidak tercapai	Tinggi	Penyelarasan kurikulum berbasis SKKNI/SKK; penguatan pembelajaran terapan berbasis TEFA; peningkatan porsi praktik
		Rendahnya minat dan partisipasi peserta pelatihan	Target peserta dan dampak pelatihan tidak optimal	Sedang	Promosi pelatihan unggulan; penguatan branding TEFA; kolaborasi dengan P4S dan pemerintah daerah
2	SK2. Kepuasan peserta pelatihan	Penurunan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan	Penurunan IKU3	Sedang	Peningkatan kualitas layanan pelatihan; pengembangan <i>blended</i>

					<i>learning</i> ; peningkatan kompetensi widyaiswara
		Ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan peserta	Efektivitas pelatihan menurun	Sedang	Analisis kebutuhan pelatihan berbasis wilayah; penguatan mekanisme umpan balik peserta
3	SK3. Kualitas pengelolaan anggaran	Keterlambatan penyerapan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran	Penurunan nilai IKPA (IKU4)	Tinggi	Penguatan perencanaan berbasis kinerja; monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala
		Lemahnya pengendalian internal	Risiko temuan audit dan penurunan kinerja	Sedang	Penguatan SPI; peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan pelaporan
4	SK4. Kepuasan masyarakat	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Penurunan IKU5	Sedang	Penerapan SPBE; penyederhanaan prosedur layanan; pengembangan

					inovasi layanan publik
		Keterbatasan kapasitas widyaiswara dan fasilitator	Mutu penyelenggaraan pelatihan menurun	Sedang	Peningkatan kompetensi widyaiswara; pengembangan komunitas praktisi
5	SK1 dan SK4	Tingginya hambatan aksesibilitas dan logistik di wilayah kerja kepulauan (10 Provinsi)	Jangkauan pelatihan tidak merata; Biaya operasional meningkat;	Tinggi	Optimalisasi pelatihan melalui metode <i>Blended Learning</i> dan <i>Learning Management System</i> (LMS)

Melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, BBPP Kupang diharapkan mampu mengendalikan potensi risiko secara proaktif serta memastikan pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Renstra 2025–2029. Manajemen risiko dengan demikian menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran BBPP Kupang sebagai pusat unggulan pelatihan vokasi berbasis *Teaching Factory* yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Pada periode 2025–2029, arah kebijakan Kementerian Pertanian diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditetapkan sebagai prioritas strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Pencapaian swasembada pangan diarahkan melalui implementasi Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 yang berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama melalui intervensi hulu–hilir, antara lain cetak sawah dan perluasan areal tanam, optimasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman, penyediaan benih unggul, perbaikan irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, serta peningkatan produksi susu dan daging nasional. Proyek strategis nasional di bidang pertanian menjadi bagian integral dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan pokok.

Sejalan dengan agenda hilirisasi nasional, kebijakan pertanian juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui penguatan agroindustri berbasis wilayah. Komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan ubi kayu didorong masuk ke rantai pasok industri melalui penguatan pascapanen, fasilitasi investasi, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM.

Dalam mendukung pemenuhan gizi nasional, strategi eskalasi produksi protein hewani diimplementasikan melalui penguatan subsektor peternakan, yang berfokus pada standardisasi pembibitan, akselerasi populasi ternak, dan stimulasi investasi peternakan berkelanjutan. Strategi tersebut diintegrasikan dengan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, guna mendukung program nasional penurunan prevalensi stunting dan pemantapan ketahanan pangan keluarga

Selain itu, Kementerian Pertanian mendukung transisi energi nasional melalui percepatan program mandiri energi berbasis biodiesel dengan peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menstabilkan harga komoditas sawit, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, strategi terintegrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 4. Blueprint Swasembada Pangan 2025–2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025–2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025–2029 terkait dengan pertanian. Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025–2029

Kerangka arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dituangkan dalam Rumah Strategi Kementerian Pertanian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Rumah strategi tersebut menggambarkan keterkaitan yang utuh antara visi, tujuan antara, pilar pembangunan, dan fondasi pendukung yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Kementerian Pertanian menetapkan lima tujuan antara yang ingin dicapai, yaitu :

1. Pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. Kemandirian pangan asal pertanian;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
5. Terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Pencapaian kelima tujuan antara tersebut mensyaratkan ditegakkannya delapan pilar utama pembangunan pertanian secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang meliputi :

1. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
4. Pemanfaatan dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional

untuk memperkuat rantai nilai;

5. Perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;
6. Pengawasan kepatuhan terhadap penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan;
7. Regenerasi petani serta pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing; dan
8. Penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Diperlukan fondasi kokoh yang saling mendukung agar pilar pembangunan pertanian berfungsi efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian nasional periode 2025–2029 ditopang oleh lima fondasi utama, yaitu :

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif dan berdaya saing;
2. Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik yang efektif;
3. Standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian sebagai penjamin mutu dan daya saing;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh tahapan usaha tani, mulai dari budidaya hingga pascapanen; dan
5. Penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices*, serta praktik baik lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, BBPP Kupang menerjemahkan pilar regenerasi petani dan fondasi penguatan SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi peternakan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah lahan kering. Strategi ini dimaksudkan agar kompetensi yang dihasilkan berkontribusi langsung pada target swasembada pangan dan ketahanan gizi nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025-2029

Dalam kerangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Arah kebijakan dan strategi tersebut diformulasikan untuk menjawab tantangan pembangunan pertanian yang

semakin kompleks, sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan BPPSDMP ditetapkan pada dua pokok utama. Pertama, **peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia**. Kebijakan ini dioperasionalisasikan melalui strategi: (1) regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan (2) pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, **penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional**. Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi implementasi reformasi birokrasi BPPSDMP untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Arah kebijakan dan strategi tersebut menegaskan bahwa pembangunan SDM pertanian 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja pertanian, tetapi juga pada penguatan kualitas melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, serta perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada periode 2025 – 2029 berperan strategis sebagai penggerak utama dalam regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia.

Implementasi arah kebijakan BPPSDMP ini di tingkat unit kerja dilaksanakan oleh BBPP Kupang melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi peternakan yang terstandarisasi, penguatan fungsi *Teaching Factory* (TEFA) sebagai sarana inkubasi wirausaha muda, serta peningkatan layanan publik yang responsif bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

3.3 Arah kebijakan dan Strategi Pusat Pelatihan Pertanian

Sejalan dengan arah kebijakan BPPSDMP, kebijakan Pusat Pelatihan (Puslatan) diarahkan untuk memperkuat daya saing SDM pertanian serta meningkatkan kinerja UPT pelatihan secara berkelanjutan. Fokus kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem manajemen mutu, akreditasi lembaga dan program pelatihan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana sebagai dasar penyelenggaraan pelatihan yang profesional.

Peningkatan kompetensi widyaiswara dan tenaga pelatihan menjadi prioritas untuk memastikan kualitas pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Di sisi lain, Puslatan mendorong pengembangan pelatihan berbasis SKKNI, penyempurnaan metode pelatihan berorientasi pasar, dan percepatan digitalisasi pelatihan untuk mendukung transformasi layanan.

Penguatan kelembagaan penyuluhan, fasilitasi P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya, serta perluasan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri menjadi bagian integral dalam memastikan ekosistem pelatihan pertanian yang inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap tantangan masa depan.

Puslatan menetapkan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan mutu pelatihan, dan perluasan jejaring kerjasama guna meningkatkan daya saing serta kinerja UPT pelatihan pertanian. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penerapan ISO secara konsisten, penyempurnaan SOP, pemenuhan sarana-prasarana pelatihan, serta optimalisasi potensi balai dalam menjalin kerjasama. Pada saat yang sama, Puslatan menekankan pembinaan kelembagaan petani, termasuk P4S, kelompok tani, wanita tani, dan pemuda tani, agar mampu berperan aktif dalam pengembangan usaha tani modern.

Peningkatan kompetensi widyaiswara dan tenaga kediklatan menjadi prioritas, terutama untuk menghadapi tuntutan teknologi dan metode pelatihan berbasis IT serta kebutuhan lingkungan strategis yang terus berubah. Dalam penyelenggaraan pelatihan, Puslatan mengembangkan perencanaan berbasis NIK, inovasi metode dan teknik pembelajaran, penguatan penjaminan mutu, digitalisasi rancang bangun pelatihan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan non-aparatur melalui berbagai program strategis, termasuk vokasi, adaptasi perubahan iklim, dan penguatan kewirausahaan. Pelatihan blended learning turut dikembangkan sebagai bentuk penyelenggaraan yang adaptif dan inklusif.

Pada bidang sertifikasi, Puslatan berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan SKKNI pertanian, penambahan asesor, penguatan skema sertifikasi, serta optimalisasi peran LDP dan TUK melalui pemanfaatan sistem informasi sertifikasi. Sementara itu, akreditasi pelatihan diperkuat melalui pengembangan tim akreditasi, digitalisasi proses, pembinaan lembaga terakreditasi, serta penyempurnaan norma dan standar akreditasi.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Puslatan juga mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri melalui penyusunan program responsif, publikasi kegiatan, pembuatan katalog penawaran kerjasama, serta kolaborasi lintas sektor dan dunia usaha/industri (MoU), sehingga UPT pelatihan dapat berperan lebih strategis dalam pembangunan SDM pertanian nasional.

3.4 Strategi Operasional Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang 2025-2029

3.4.1 Arah Kebijakan

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian swasembada pangan nasional berkelanjutan, BBPP Kupang menetapkan arah kebijakan periode 2025–2029 yang berorientasi pada transformasi sumber daya manusia pertanian sebagai penggerak utama produktivitas dan nilai tambah. Strategi ini diselaraskan dengan kerangka kebijakan Kementerian Pertanian dan BPPSDMP melalui penguatan kapasitas vokasi berbasis kompetensi, peningkatan daya saing kelembagaan, serta implementasi tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel guna memastikan efektivitas intervensi kebijakan di tingkat lapangan.

Arah kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan *Teaching Factory* (TEFA) sebagai model pembelajaran unggulan BBPP Kupang, yang mengintegrasikan proses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan inkubasi agribisnis dalam satu ekosistem pembelajaran terapan berbasis proses bisnis riil. Melalui TEFA, BBPP Kupang mendorong pelatihan yang aplikatif, adaptif terhadap kebutuhan wilayah, serta selaras dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri, khususnya di bidang peternakan dan teknologi lahan kering.

Sasaran akhir dari kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui penguasaan teknologi tepat guna dan penguatan akses pasar, sehingga mampu mengubah profil pelaku utama menjadi wirausahawan agribisnis yang mandiri dan memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan BBPP Kupang Tahun 2025–2029

meliputi :

1. Penyelenggaraan pelatihan vokasi pertanian dan peternakan berbasis kompetensi dan kebutuhan wilayah, melalui penetapan pelatihan unggulan BBPP Kupang yang selaras dengan potensi peternakan serta agribisnis lahan kering, guna mendukung akselerasi swasembada pangan berkelanjutan sebagai program prioritas pembangunan pertanian nasional.
2. Penguatan dan pengembangan *Teaching Factory* (TEFA) sebagai model pembelajaran unggulan BBPP Kupang, yang mengintegrasikan kegiatan praktik, produksi, pemasaran, dan kewirausahaan pertanian dalam satu ekosistem pembelajaran terapan.
3. Transformasi digital penyelenggaraan pelatihan, melalui penerapan pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan layanan pelatihan.
4. Peningkatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan profesi pertanian, melalui penguatan peran BBPP Kupang sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), peningkatan kapasitas asesor kompetensi, serta penguatan keterkaitan sertifikasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, melalui pembinaan, registrasi dan legalisasi, standardisasi, akreditasi, serta penguatan jejaring kemitraan pelatihan.
6. Penguatan peran BBPP Kupang sebagai pusat inkubasi agribisnis dan kewirausahaan pertanian, melalui pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis yang terintegrasi dengan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pendampingan usaha, dan kemitraan strategis.
7. Pengembangan Agro Edu Wisata sebagai wahana pembelajaran terapan, diseminasi inovasi, dan peningkatan literasi pertanian yang mendukung fungsi edukatif, sosial, dan promosi teknologi balai.
8. Dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Kementerian Pertanian di wilayah kerja BBPP Kupang melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis, serta sinergi lintas pemangku kepentingan.
9. Penguatan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi BBPP Kupang, melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan

akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan sistem manajemen mutu.

3.4.2 Strategi

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan BBPP Kupang Tahun 2025–2029, ditetapkan strategi pelaksanaan sebagai pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan balai. Strategi ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi BBPP Kupang, kebutuhan wilayah kerja, serta hasil analisis lingkungan strategis, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelatihan vokasi, pengembangan *Teaching Factory* (TEFA), penguatan sertifikasi kompetensi, kemitraan, dan tata kelola organisasi.

1. Strategi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Wilayah, guna mengakselerasi pencapaian swasembada pangan berkelanjutan, meliputi :
 - a. Menetapkan dan mengembangkan pelatihan unggulan BBPP Kupang di bidang peternakan dan agribisnis lahan kering sesuai potensi wilayah kerja.
 - b. Menyelaraskan materi pelatihan dengan program prioritas pembangunan pertanian nasional.
 - c. Menerapkan sistem rekrutmen peserta pelatihan berbasis kebutuhan wilayah dan sasaran pengguna.
 - d. Memperkuat keterlibatan pemerintah daerah, BPP, dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.
2. Strategi Penguatan dan Pengembangan *Teaching Factory* (TEFA), yaitu:
 - a. Mengintegrasikan TEFA ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran pelatihan vokasi
 - b. Mengoptimalkan sarana TEFA (Singgako Mart dan kandang ayam *closed house*) sebagai media pembelajaran berbasis proses bisnis riil.
 - c. Menerapkan pendekatan pembelajaran *learning by doing* dari hulu hingga hilir.
 - d. Mengembangkan kemitraan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan TEFA.
 - e. Menjadikan TEFA sebagai wahana praktik, uji kompetensi, magang, dan inkubasi usaha peserta pelatihan.

3. Strategi Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelatihan, melalui :
 - a. Mengembangkan pembelajaran berbasis *e-learning* dan *blended learning*.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pelatihan.
 - c. Mengembangkan konten pembelajaran digital dan metode pembelajaran inovatif.
 - d. Memperluas jangkauan layanan pelatihan ke wilayah terpencil di kawasan Indonesia Timur .
4. Strategi Penguatan Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Pertanian, melalui:
 - a. Memperkuat peran BBPP Kupang sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) sektor pertanian.
 - b. Meningkatkan jumlah dan kapasitas widyaiswara sebagai asesor kompetensi.
 - c. Mengembangkan dan memperluas skema sertifikasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
 - d. Memperkuat koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk peningkatan mutu dan kecepatan layanan sertifikasi..
5. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, meliputi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi, registrasi, dan legalisasi kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
 - b. Mendorong standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi lembaga pelatihan swadaya.
 - c. Mengembangkan model pembinaan dan pendampingan yang adaptif dan berkelanjutan.
 - d. Memperkuat jejaring kemitraan pelatihan dengan BBPP Kupang sebagai pusat rujukan pelatihan.
6. Strategi Pengembangan Inkubasi Agribisnis dan Kewirausahaan Pertanian, melalui :
 - a. Mengintegrasikan Pusat Inkubator Agribisnis dengan pelatihan vokasi dan TEFA.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung inkubasi usaha pertanian.
 - c. Memfasilitasi kemitraan usaha, akses pasar, dan pendampingan pascapelatihan.

- d. Mendorong lahirnya wirausaha pertanian baru (job creator) dari purnawidya.
- 7. Strategi Pengembangan Agro Edu Wisata, melalui :
 - a. Mengembangkan Agro Edu Wisata sebagai sarana pembelajaran terapan dan diseminasi inovasi pertanian.
 - b. Mengintegrasikan Agro Edu Wisata dengan program pelatihan, TEFA, dan inkubasi agribisnis.
 - c. Memperkuat fungsi promosi, edukasi, dan sosial balai kepada masyarakat.
 - d. Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- 8. Strategi Dukungan terhadap Program Prioritas Kementerian Pertanian
 - a. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis program prioritas Kementerian Pertanian.
 - b. Memperkuat kapasitas SDM pelaksana program di wilayah kerja BBPP Kupang.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program prioritas.
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program secara berkala.
- 9. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
 - a. Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi.
 - b. Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
 - d. Menerapkan sistem manajemen mutu dan pengendalian internal secara konsisten.
 - e. Mengembangkan budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan.

3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi BBPP Kupang merupakan acuan pelaksanaan kebijakan dan pedoman teknis yang mengacu pada kerangka regulasi Pusat Pelatihan Pertanian sebagai unit pembina. Kerangka regulasi ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian di wilayah kerja BBPP Kupang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis. Regulasi yang menjadi acuan dan akan diimplementasikan dalam kurun waktu Tahun 2025–2029 meliputi :

- a. Implementasi hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian dalam penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional di BBPP Kupang.
- b. Implementasi hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian sebagai dasar pelaksanaan fungsi BBPP Kupang sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- c. Implementasi hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dalam kegiatan pembinaan dan penguatan Lembaga Pelatihan Swadaya (LPS) di wilayah kerja BBPP Kupang.
- d. Implementasi hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Pertanian dalam mendukung peningkatan mutu dan pengakuan kompetensi lulusan pelatihan.
- e. Penerapan hasil revisi Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan Teknis Pertanian sebagai dasar peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan dan lembaga pelatihan mitra.
- f. Penerapan hasil revisi Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Pelatihan Pertanian dalam pengembangan jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan.
- g. Penerapan pedoman pengembangan teknologi pembelajaran bidang pertanian, khususnya metode pelatihan blended learning, e-learning, dan pembelajaran berbasis praktik sesuai karakteristik wilayah kerja BBPP Kupang.
- h. Implementasi hasil revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan dalam penguatan fasilitas pelatihan dan *Teaching Factory* BBPP Kupang.
- i. Penerapan pedoman evaluasi peserta pelatihan sebagai dasar penilaian capaian kompetensi dan peningkatan kualitas lulusan.
- j. Penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengaturan beban tugas widyaiswara dalam rangka menjamin efektivitas, kualitas, dan profesionalisme penyelenggaraan pelatihan.

3.6 Kerangka Kelembagaan

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IIB di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), dengan pembinaan teknis fungsional oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Berdasarkan mandat wilayah kerja nasional, BBPP Kupang bertanggung jawab atas pengembangan SDM di 10 provinsi, mulai dari Nusa Tenggara hingga Maluku, dengan spesialisasi pada ternak potong dan teknologi lahan kering. Pola hubungan kerja dan sinergi BBPP Kupang dalam struktur kelembagaan diatur sebagai berikut :

- a. Koordinasi Vertikal: Menyelaraskan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi dengan kebijakan strategis BPPSDMP dan Pusat Pelatihan Pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional.
- b. Sinergi Akademik dan Vokasi: Menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri seperti Universitas Nusa Cendana, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Politeknik Kupang, Politeknik Kupang, serta SMK se-Provinsi NTT dalam praktik kerja lapangan.
- c. Kerja Sama Teknis dan Inovasi: Bermitra dengan Bank Indonesia (B), Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) NTT, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, dan balai pelatihan lainnya untuk desiminasi teknologi peternakan tepat guna.
- d. Kolaborasi Lintas Sektoral: Membangun jejaring dengan pemerintah daerah, dinas pertanian/peternakan di 10 provinsi wilayah kerja, koperasi, serta instansi terkait lainnya guna memastikan materi pelatihan relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi daerah.

Melalui kerangka kelembagaan yang inklusif ini, BBPP Kupang berperan sebagai pusat rujukan (*center of excellence*) yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil pelaku usaha tani di wilayah Indonesia Timur.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja BBPP Kupang menggambarkan hasil yang akan dicapai beserta satuan ukur dari setiap indikator kinerja, yang mencakup sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsi BBPP Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis. Perumusan target kinerja dilakukan dengan mengacu pada pohon kinerja Kementerian Pertanian dan Badan PPSDMP untuk menjaga keselarasan vertikal dan horizontal, serta memastikan kontribusi nyata BBPP Kupang terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian. Target kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Target Kinerja BBPP Kupang 2025-2029

Sasaran Kegiatan		IKSK		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	IKU 1.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) (%)	20	18	16	14	12
		IKU 1.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis	25	23	21	19	17

			pertanian (non aparatur) (%)					
SK 2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggara an pelatihan	IKU 2	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggara an pelatihan (Skala Likert)	4	4,1	4,2	4,3	4,4
SK 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang	IKU 3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Kupang	IKU 4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik BBPP Kupang (Skala Likert)	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian seluruh sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi operasional BBPP Kupang periode 2025-2029 memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, terukur, dan berkelanjutan. Kerangka pendanaan BBPP Kupang disusun secara indikatif sebagai bagian integral dari kerangka pendanaan BPPSDMP dan Kementerian Pertanian guna menjamin keterkaitan yang erat antara sasaran yang ditetapkan, target kinerja yang ingin dicapai, dan ketersediaan sumber daya finansial.

Implementasi pendanaan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, terutama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi peternakan, pengembangan model pembelajaran *Teaching Factory* (TEFA), serta transformasi digital dalam pelayanan publik. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna meminimalkan risiko keterlambatan penyerapan anggaran maupun ketidaktepatan penggunaan dana yang dapat menghambat pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara lebih rinci, kebutuhan pendanaan indikatif BBPP Kupang Tahun 2025–2029 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan sasaran program pembangunan pertanian nasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Kerangka Pendanaan BBPP Kupang 2025-2029

Sasaran Kegiatan		IKSK		Alokasi (dalam milyar)				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	IKU1.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	9.158	10.342	10.859	11.402	11.972
		IKU1.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)					
SK2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap	IKU2	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan					

	penyelenggaraan pelatihan		pelatihan					
SK3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang	IKU3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang					
SK4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Kupang	IKU4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik BBPP Kupang					

BAB VI. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BBPP Kupang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam menjawab dinamika lingkungan strategis sesuai tugas dan fungsi balai. Renstra ini memegang peran krusial sebagai alat validasi *cascading* dan konsistensi SAKIP, yang menjamin bahwa setiap sumber daya yang dioptimalkan berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran program BPPSDMP dan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Melalui penjabaran kebijakan nasional ke dalam rencana prioritas yang terukur, akuntabel, dan berkesinambungan, BBPP Kupang berkomitmen untuk memenuhi setiap target kinerja yang telah ditetapkan. Komitmen ini didukung dengan penerapan manajemen risiko secara sistematis guna meminimalkan hambatan dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pelatihan vokasi serta layanan publik.

Demikian Renstra ini disusun sebagai landasan bagi seluruh jajaran BBPP Kupang dalam melaksanakan transformasi SDM pertanian melalui pelatihan profesi, penguatan *Teaching Factory* (TEFA), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Semoga dokumen ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam melahirkan SDM pertanian yang unggul, mandiri, dan berdaya saing demi mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.